



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 910/I/VI/2016

**PERS DAN PUBLIK DIMINTA
AWASI PEMBAHASAN
APBN-P 2016**

**BURT DPR KRITISI PELAYANAN
RS HAULUSSY AMBON**

**PEMERINTAH PUSAT DIHARAPKAN BERI
PERHATIAN KHUSUS PADA BATAM**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan

Pers dan Publik diminta Awasi Pembahasan APBN-P 2016

Ketua DPR Ade Komarudin mengajak pers masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pembahasan APBN-P 2016. Hal itu dimaksudkan supaya tidak ada pihak yang bermain dalam pembahasan yang rutin dilakukan tiap pertengahan tahun.

Hal itu disampaikannya ketika menghadiri Press Gathering di Hotel Novotel, Batam pada Jumat, (27/05). “Sebentar lagi saatnya pembahasan APBN-P, saya ingin pers dan masyarakat sama-sama memelototi pembahasan ini,” ujar Akom, sapaan akrab Ade Komarudin.

Alumni UIN Jakarta ini juga menyinggung perkembangan terbaru dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) Anggota DPR. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini masih ada 150 dari 560 legislator yang masih berurusan dengan LHKPN. Dari 150 anggota tersebut, terbagi dalam dua kategori yakni belum melapor dan kedua belum diperbaharui.

“Yang dua tahun belum lapor untuk diperbaiki LHKPN. saya minta Pimpinan KPK untuk kirim surat ke DPR agar ada dasar untuk saya sampaikan ke anggota dewan,” ujar Politisi Golkar tersebut.

Terkait hal itu, mantan aktivis HMI itu kembali mengingatkan agar proses pengawasan anggota DPR saat perumusan anggaran tidak terjebak dengan ‘moral hazard’. “Kasih DPR sudah bonyok karena banyak ditangkap, sekarang kita mengingatkan teman-teman agar tidak terjadi lagi dalam pembahasan anggaran,” kata Akom.

Akom juga mendorong agar dilakukan upaya preventif agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan anggaran. “Maksud

saya lebih baik kita lakukan tindakan preventif agar itu tidak terjadi lagi dalam pembahasan anggaran,” tegas Akom.

“Saya tidak mau lagi ada OTT (Operasi Tangkap Tangan). Kalau enggak OTT tapi kemudian hari ada masalah. Cukup sudahlah walau mungkin 100 persen tidak,” tambahnya.

Akom juga menyoroti sikap apriori yang dilakukan masyarakat ketika melihat DPR. Sehingga tindakan sebaik apapun yang dilakukan anggota DPR tidak diapresiasi masyarakat. “Sebagus apapun dibilang jelek karena sudah apriori. Apes betul dewan sekarang ini, silahkan pelototi pembahasan anggaran di Banggar. Kita cegah, jangan andalkan KPK saja,” pungkasnya. ■

(hs.mp), foto: jaksa/hr



Pimpinan DPR Gelar Jumpa Pers Konser Peringatan 70 Tahun Pancasila

Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah didampingi Sekjen DPR Winantuningtyas Titi Swasanany beserta Ratna Sarumpaet dan Musisi Ahmad Dani, mengadakan acara konferensi pers, terkait dengan digelarnya Konser Revolusi Pancasila di Gedung Nusantara IV Pustakaloka, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.



Suasana Konferensi Pers konser peringatan 70 tahun Pancasila.

“Malam hari ini DPR bekerja sama dengan Ibu Ratna Sarumpaet dan Musisi Ahmad Dani, diselenggarakan acara dalam rangka peringatan 70 tahun Pancasila. Yang salah satu tujuannya adalah agar kita senantiasa menjaga dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara,” tutur Winantuningtyas Titi, di ruang Media Center, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).

Menurutnya, keikhlasan Ahmad Dani dan Ibu Ratna Sarumpaet, meski dikemas dalam bentuk hiburan, tapi tanpa menghilangkan makna dari tujuan kita yaitu memperingati 70 tahun Pancasila. Konser Revolusi Pancasila tersebut, diisi dengan beberapa puisi dan lagu-lagu yang dapat disaksikan bersama.

Wakil Ketua Fadli Zon menyatakan, acara ini adalah sebuah peringatan dalam rangka memperingati hari Pancasila yang

akan berlangsung pada tanggal 1 Juni,

“Ahmad Dani dan kawan-kawan serta Ibu Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu, dengan persiapan yang sangat singkat, menginginkan ada satu konser musik dan juga orasi digedung DPR. Karena DPR ini rumah rakyat, maka kita dengan terbuka dan sangat senang menyambut inisiatif tersebut,” jelas Fadli Zon.

Ia juga mengatakan bahwa inisiatif menggelar konser musik ini, karena memang dirasa jauh lebih mudah untuk dicerna, sekaligus untuk melakukan sosialisasi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup, way of life, dari kehidupan berkebangsaan kita. DPR menyambut positif adanya inisiatif ini, mudah-mudahan ini bukan inisiatif yang pertama dan terakhir.

Sedangkan musisi Ahmad Dani menyatakan bahwa dirinya berharap banyak anggota Dewan di DPR yang me-

iliki perhatian terhadap acara kesenian dan budaya.

Dalam konferensi pers tersebut, Ratna Sarumpaet mengakui dirinya membuat suatu “Gerakan Selamatkan Indonesia”, yang lahir karena kegelisahan kawan-kawan yang ada dalam gerakan itu, akan kondisi bangsa Indonesia pasca amandemen UUD 45, sehingga dirasa hilang makna Pancasila dari batang tubuh UUD itu sendiri.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa kemeriahan hari lahirnya Pancasila harus terus disemarakkan, dan nantinya akan ada dialog lain, yakni tentang bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi dunia. Sebab menurutnya, semua yang hadir pada saat ini, sedang berada di gedung dunia, bukan sekedar gedung Indonesia, sesuai dengan gagasan Bung Karno saat akan mendirikan Gedung DPR ini. ■

(dep.mpr), foto: rmit/br

BULETIN
PARLEMENTARIA



PENGAWASUMUM Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si, (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak) Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis) Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuti, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Anianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail dpr.pemberitaan@gmail.com www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Siti Rondiyah **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Membangun Sinergitas Guna Produktifitas Dewan

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengajak semua rekan-rekan media Koordinatoriat DPR untuk menjalin kerja sama semua unsur di lingkungan legislatif dengan baik. Kerja sama yang dimaksud Akom, sapaan akrabnya adalah, membangun sinergitas guna produktifitas dewan dalam pembuatan undang-undang.

Hal tersebut disampaikan saat acara Press Gathering dengan Wartawan Koordinatoriat DPR di Batam, Jumat (27/5) malam. “Mari kita sama-sama perbaiki lembaga ini. Mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa bantu. Semoga dengan kerjasama yang baik ada perubahan yang baik pula untuk DPR,” pinta Akom di hadapan awak media disaksikan Sekjen dan BKD dan sejumlah Pejabat Setjen DPR.

Acara pertemuan ini berlangsung akrab dan penuh canda tawa dan hadir pula dalam acara yang bertajuk “Refleksi Atas Revisi UU BUMN dan Proyeksi Batam Sebagai Kota Industri” ini Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana, dan unsur pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk kesekian kalinya Akom lagi-lagi menyampaikan kepada para wartawan, bahwa Pimpinan DPR selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja para dewan priode 2014-2019. Karena dia menyadari dengan sangat, hal tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, oleh sebab itu sudah selayaknya dewan mempersembahkan kinerja terbaiknya untuk rakyat.

Politisi dari Partai Golkar ini juga menyampaikan keluhannya kepada para wartawan Koordinatoriat DPR agar dalam membuat berita selalu mengedepankan pemikiran dan penggalian isu yang logis



Ketua DPR Ade Komarudin menjadi pembicara dalam Press Gathering Wartawan Koordinator DPR RI

dan konstruktif untuk lembaga DPR. Akom tidak menghendaki adanya *framing* isu yang sengaja dibuat untuk merusak kinerja dewan.

“Untuk itu kita sama-sama dorong DPR produktif, tapi yang logis dalam membuat berita. Saya ajak teman-teman ikut mendorong menyelesaikan masalah dan kendala apa yang menjadi ganjalan dalam pembuatan undang-undang,” ajak Akom.

Selain itu, Akom juga menyampaikan bahwa sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik juga selalu dibenahi. Pembinaan ini bertujuan agar parpol bisa mendelegasikan kader terbaik untuk lembaga tinggi negara ini.

“Saya punya keinginan untuk penguatan lembaga dengan benar. Saya ingin memberi yang terbaik, agar lembaga ini menjadi bersih manusianya dan gedungnya,” ungkap Ketua PB HMI priode 1993 - 1998. ■

(foto: mp/jawajakarta.br)

Ketua DPR Ajak Masyarakat Internalisasikan Kembali Nilai-nilai Pancasila

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan dan menginternalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini disampaikan Ade Komarudin sehubungan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar hari ini, Rabu (1/6) di Bandung, Jawa Barat.

“Saya mengajak seluruh elemen

bangsa ini untuk bersatu padu dan bergotong royong mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah sebuah konsepsi dan cita-cita yang harus diwujudkan. Melalui Pancasila, bangsa kita mempunyai pedoman serta arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar pria yang biasa dipanggil Akom tersebut.

Akom menjelaskan, Pancasila adalah falsafah dan ideologi negara. Di dalamnya ada nilai-nilai luhur bangsa yang semuanya harus mengejawantah dalam diri anak bangsa. Menurutnya,

Fahri Hamzah Harapkan Mahasiswa Lebih Berani dan Kritis

Dalam kunjungannya ke Semarang Sabtu (28/5) lalu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menantang para mahasiswa untuk bisa lebih berani dan lebih kritis dalam kehidupan kemahasiswaan.

“Adakah keberanian dari mahasiswa untuk menyoal dari peraturan-peraturan yang sudah mapan dengan tradisi legislatif baru yang akan dibuat oleh mahasiswa” ujarnya dalam pidato pengisian materi kepada mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang.

Jadi lanjutnya, bukan hanya menentang peraturan rektorat tentang mahasiswa, tetapi jika perlu mahasiswa mengajukan usulan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR RI. “Kalau anda punya konsepnya, saya secara pribadi akan menerima usulan RUU dan memperjuangkannya menjadi usulan rancangan undang-undang untuk mengatur



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

kehidupan mahasiswa” ungkap Pimpinan DPR Korkesra ini dalam acara Training Legislatif 1 2016 tersebut di ruang Palang Merah Indonesia.

Menurutnya, tugas legislasi politik negara dengan lembaga legislasi kampus memiliki kecenderungan dari gerakan mahasiswa yang memformulasikan atau membentuk kelembagaan yang mirip dengan kelembagaan politik nasional.

“Itu bisa saja, asalkan mahasiswa tidak terjebak untuk kemudian berpolitik dalam pengertian politik kekuasaan, karena sesungguhnya tidak ada yang diperebutkan oleh mahasiswa. Jadi tantangannya adalah apakah bisa mengatur kehidupan mahasiswa?” tantangannya kepada para mahasiswa.

Mahasiswa sambungnya,

sudah terperangkap dalam sistem lama, Ketika negara berpendapat bahwa mahasiswa ini adalah mesin-mesin pembangunan industri yang disiapkan untuk bekerja, lalu seperti sebuah mesin kerja dalam kapitalisme yang semakin sempurna (theory mass production).

Makanya mahasiswa juga masuk kedalam skema *mass production*, dimana umur mahasiswa dikampus itu dibatasi secara sangat ketat. Ia mengharapkan para mahasiswa kritis dalam membaca diri dan tidak terlalu fulgar ingin mencontoh skema dan *design* dari politik nasional, sebab politik nasional itu ada pewarisan yang tidak punya jangka waktu.

Mahasiswa sebagai partai politik kampus dapat mengatur ideologinya, apa yang akan diperjuangkan di kampus, sehingga betul-betul mempunyai *bargain* yang kuat kedalam kampus, sehingga punya kapasitas untuk mengatur kehidupan mahasiswa.

“Dengan membentuk *student government*, maka yang disebut aspirasi dan representasi menjadi riil. Kepentingan anda sebagai mahasiswa tidak serta merta dapat didikte oleh negara dan rektorat,” kata Fahri Hamzah. ■

(emo,mp). Foto : Krema/br

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diperjuangkan bersama oleh seluruh elemen bangsa hingga mampu terealisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

“Presiden Soekarno telah membuat dasar bernegara kita yang terangkum dalam lima sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang digagas oleh Presiden Soekarno tersebut harus kita perjuangkan secara bersama. Tanpa perjuangan, maka pesan-pesan tersebut tidak akan menjadi realitas,” ucap Akom.

Di tengah tantangan Indonesia saat ini yang semakin kompleks, Akom menyebut Pancasila dapat menjadi pemersatu sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa. Oleh karena itu, menurutnya, generasi saat ini bertugas untuk menjadikan Pancasila tetap relevan



Ketua DPR Ade Komarudin

dengan konteks kekinian.

“Generasi kita saat ini dan yang akan datang, bertugas untuk menjadikan Pancasila tetap relevan dengan konteks kekinian dan mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah tantangan Indonesia saat ini yang semakin kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, hukum, dan kedaruratan sosial, Pancasila tidak hanya jadi pemersatu, tapi juga menjadi solusi atas berbagai permasalahan tersebut,” pungkas Akom. ■

(mb), foto : Azka/br

DPR dan NDI Bahas Kerjasama Peningkatan Kapasitas Staf Kedewanan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Director of Governance Programs, dari National Democratic Institute (NDI), K. Scoot Hubli, di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).



Wakil Ketua DPR Fadli Zon Menerima Perwakilan National Democratic Institute

Pertemuan terfokus pada kerjasama untuk peningkatan kapasitas staf sebagai *supporting system* Anggota Dewan.

“NDI dan House Democratic Parliamentary menawarkan beberapa

kerjasama dengan DPR. Namun saya mengusulkan, yang kami perlukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan *capacity building of staff*, atau meningkatkan kapasitas staf,” kata Fadli, usai pertemuan.

Politisi F-Gerindra ini menilai,

fungsi staf kedewanan di Amerika sudah cukup bagus, dengan komposisi 1 Anggota Kongres, yang didukung 13 orang staf. Seluruh staf ini berasal dari partisan staf dan non partisan staf.

“Yang kita butuhkan adalah pelatihan untuk partisan staf. Karena untuk yang non partisan, berarti dari staf Sekretariat Jenderal, sudah sering (mendapatkan pelatihan-red). Untuk partisan staf, misalnya tenaga ahli Anggota Dewan, di kirim ke AS, dan mendapat pelatihan di sini (Indonesia-red), NDI siap mendukung itu,” jelas Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat ini mengapresiasi tawaran yang cukup baik ini. Ia juga memastikan, untuk pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau setelah Pemilu di AS, yang jatuh pada November mendatang.

“Untuk pelaksanaannya, mereka menyerahkan kepada kita. Kita akan diskusikan dengan Kesetjengan, dan Pimpinan, bagaimana bentuk-bentuk yang kita tawarkan untuk kerjasama peningkatan kapasitas DPR, mungkin program anti korupsi, SDGs, dan lain-lain,” tambah Fadli. ■

(5/), foto: andri/br

Idealnya Minimal 5 Persen Kewajiban CSR Perusahaan



Anggota Komisi VIII DPR Anda

Besaran kewajiban anggaran *corporate social responsibility* (CSR) belum seragam angka persentasenya bagi semua perusahaan.

Kelak bila sudah ada payung hukumnya, dana CSR wajib disisihkan minimal 5 persen dari laba.

Demikian usulan yang disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Anda, di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (2/7). Usulan ini sebetulnya masih kecil, apalagi bagi perusahaan-perusahaan besar. Usulan besaran CSR ini terkait dengan rencana Komisi VIII DPR yang ingin menyusun draf RUU

CSR dan sedang menghimpun masukan dari berbagai daerah.

Selama ini, sejumlah perusahaan mengeluarkan anggaran CSR mulai 1 sampai 4 persen dari laba yang sudah diraih. Menurut Anda, penduduk miskin yang tinggal di sekitar perusahaan cukup banyak, sehingga membutuhkan pemberdayaan dari anggaran CSR, apalagi alokasi anggaran pemerintah dari APBN sangat terbatas.

Fadli Zon Luncurkan Buku Perjalanan Kehidupan di Ulang ke-45

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meluncurkan buku berjudul Menyusuri Lorong Waktu, bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-45, yang diperingati setiap 1 Juni. Bertempat di Red Top Hotel, Jakarta, pada Rabu (1/06), acara ulang dan peluncuran buku ini berlangsung dengan kehangatan, dan dihadiri oleh segenap kolega Fadli.

Fadli mengatakan, buku ini adalah catatan hidupnya selama 45 tahun. Buku setebal lebih dari 500 halaman ini juga menceritakan seorang Fadli ketika menjalani masa sekolah, hingga ke perjalanan politiknya.

“Menyusuri perjalanan hidup ini, saya mengalami banyak jatuh bangun. Saya mensyukuri hidup. Hidup adalah hadiah. Hidup itu ya hari, sekarang. Setiap kita menarik nafas, harus kita syukuri. Kita tidak akan pernah tahu kapan dipanggil oleh-Nya,” kata Fadli.

“Buku ini persembahkan kepada ibu saya, yang telah melahirkan saya 45 tahun yang lalu. Buku ini juga sebagai pertanggungjawaban hidup saya selama ini kepada orang tua saya. Ya mudah-mudahan hidup saya selama 45 tahun



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan potongan nasi tumpeng kepada Sekjen DPR

“Dalam aturan baru nanti harus ada besaran minimal CSR dan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR. Dengan begiti banyak masyarakat yang akan terbantu,” tandas politisi Partai Gerindra tersebut.

Ditambahkan Anda, aturan CSR ini hendaknya tidak menjadi beban bagi perusahaan. Sebaliknya, justru jadi kebutuhan perusahaan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat. CSR, lanjut politisi dari dapil Banten I ini, harus pula dipahami perusahaan untuk bantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan sekaligus mencerdaskan anak bangsa. ■

(mb), foto: Husen/br

ini bermanfaat, dengan banyak cobaan dan tantangan,” imbuh Fadli.

Dalam acara ini, politisi asal dapil Jawa Barat ini juga mendapat kejutan dari kehadiran guru kelas 1 Sekolah Dasar, Ibu Mujinem, saat Fadli bersekolah di SDN Cibereum, Bogor, Jawa Barat. Ibu Mujinem pun menceritakan kisahnya ketika mengajar Fadli.

“Fadli itu seorang anak yang dari kelas 1 sudah pandai. Dari kelas 1 sampai 6 itu selalu juara umum.

Anaknya pendiam. Namun sudah ada bibit menjadi orang sukses dan pintar. Saya senang mendengar anak didik saya sukses,” katanya.

Sesaat sebelum peluncuran buku, dilaksanakan potong tumpeng, sebagai rasa syukur Fadli yang telah menginjak usia ke-45. Potongan tumpeng pertama diberikan ibunya, Ibu Ellyda Yatim, dan berikutnya kepada Ibu Mujinem.

Sejumlah kolega pun turut hadir dalam acara ini, diantaranya Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto, beserta Pimpinan AKD DPR. Hadir juga Ketua DPD RI Irman Gusman, MenPAN & RB Yuddy Chrisnandi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan musisi Ahmad Dhani dan Cagub DKI Sandiaga Uno. ■

(69), foto: unati/br

Revisi UU Pilkada Diharapkan Tidak Diskriminatif

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang kini sedang dirumuskan Komisi II DPR RI dengan pemerintah, diupayakan tidak diskriminatif terhadap semua warga negara yang ingin berkontestasi dalam Pilkada. RUU ini memperlakukan semua warga negara setara.

Demikian penegasan Wakil Ketua Komisi II DPR Muhammad Lukman Edy pada diskusi Forum Legislasi yang membincang RUU Pilkada, Selasa (26/4). Hadir pula sebagai pembicara Juri Ardiantoro (komisioner KPU) dan Karyono Wibowo (Indonesia Public Institute). Banyak isu penting yang sedang dibahas, mulai dari syarat bagi calon perseorangan, ketentuan mengundurkan diri dari jabatan publik, dan politik uang.

Isu paling seksi adalah ketentuan syarat bagi calon perseorangan. Dijelaskan Lukman, perkembangan terakhir dari RUU Pilkada ini, mensyaratkan 6,5-10 persen dukungan berdasarkan daftar pemilih tetap bagi calon perseorangan. "Ini sudah menjadi angka psikologis publik," ungkap politisi PKB tersebut.

DPR dan pemerintah sudah sepakat soal angka ini. Sementara untuk



Wakil Ketua Komisi II DPR Mubammad Lukman Edy dalam acara Forum Legislasi DPR

calon kepala daerah dari partai politik mensyaratkan 15-20 persen. Penetapan angka-angka ini ke dalam rumusan RUU sudah mempertimbangkan asas keadilan dan kesetaraan. Isu ini menjadi sangat seksi di publik, terutama bersamaan dengan pencalonan Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

Menurut pengamat politik Karyono Wibowo, syarat yang ditetapkan dalam RUU ini sudah ideal, walau mungkin dirasa memberatkan bagi calon perseorangan. Yang paling penting adalah

bagaimana memperkuat verifikasinya. Tak banyak calon perseorangan yang terpilih dalam kontestasi Pilkada. Angkanya masih di bawah 10 persen. Sisanya, selalu dimenangkan para politisi.

Syarat calon perseorangan, sambung Karyono, tak perlu diperberat lagi. Apalagi, isu ini juga sangat sensitif, karena dipicu pencalonan Ahok di Pilkada DKI. "Menurut saya tetap direntang 6,5-10 persen saja. Tak perlu ditambah lagi," katanya dalam diskusi tersebut. ■

(mb), foto: Naejungji/br



Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan

Komisi IV Gelar RDP dengan Gubernur Sultra dan Kalbar

Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, yang membahas presentasi tentang Perubahan Kawasan Hutan Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Kalimantan Barat.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan.

"Sesuai dengan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang permohonan percepatan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan

BURT DPR Kritisi Pelayanan RS Haulussy Ambon

Wakil Ketua BURT (Badan urusan rumah tangga), Elva Hartati mengkritisi pelayanan dan fasilitas yang diberikan RSUD Dr. M Haulussy kepada anggota DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau RSUD Dr.M Haulussy, Ambon, Provinsi Maluku, Selasa (31/5).

“Kedatangan kami, Tim kunjungan kerja BURT ke RSUD Haulussy ini tujuannya adalah untuk meninjau program jaminan kesehatan bagi anggota DPR RI beserta keluarganya di seluruh Indonesia. Kali ini kebetulan provinsi Maluku yg kita datangi,” ujar Elva.

Sayangnya lanjut Elva, setelah ia melihat langsung kondisi rumah sakit bersama seluruh tim BURT yang terdiri dari Wakil Ketua BURT, Agung Budi Santoso, anggota BURT, Irma Suryani Chaniago, Sri Melliyan, Muslim, Andy Fauziah Pujiwati, Veny Devianty, dan Rendy M Affandy Lamadjido, mendapati kenyataan bahwa rumah sakit terbesar di provinsi itu belum memadai pelayanannya.

Dimana standar pelayanan anggota DPR RI berdasarkan peraturan yang ada adalah VIP. Sementara rumah sakit tersebut belum memiliki ruang VIP, hanya ruang khusus sebagai ruang dengan

yang luas, serta bernilai strategis dalam rangka revisi RTRWP. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Menteri LHK telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (KORINBANG), terhadap rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan,” ucap Daniel Johan saat memberikan paparan dalam RDP tersebut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Pada sesi akhir RDP, Komisi IV beserta Gubernur Kalbar dan Gubernur Sultra menyetujui beberapa kesimpulan



Tim Kunker BURT DPR saat meninjau RSUD Haulussy, Maluku

kualitas tertinggi.

“Tidak hanya ketiadaan ruang VIP di rumah sakit tersebut, namun juga fasilitas lainnya berupa alat-alat kesehatan dan tenaga medis nya kurang lengkap. Sebut saja tidak adanya dokter ahli jantung yang stand by di rumah sakit tersebut,” tambah politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini.

Hal senada juga disampaikan

yang akan dilakukan tindak lanjut pada rapat selanjutnya.

“Komisi IV DPR meminta kepada kedua Gubernur yang hadir tersebut untuk memberikan data-data yang menyeluruh mengenai penggunaan serta pemanfaatan kawasan hutan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP di kedua Provinsi yang terkait. Dan Komisi IV akan membentuk Panja RTRWP Sultra dan Kalbar untuk melakukan kajian dan pendalaman,” tutur Daniel Johan sebelum menutup rapat. ■

anggota BURT, Irma Suryani Chaniago. Irma menilai bahwa kekurangan fasilitas RSUD Haulussy yang notabene menjadi satu-satunya rumah sakit terbesar yang juga diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dari berbagai kabupaten di Provinsi Maluku itu merupakan sesuatu yang fatal.

Lebih jauh ia melihat penyebab ketiadaan tenaga spesialis jantung di rumah sakit tersebut adalah dikarenakan ketimpangan penghasilan dan insentif yang diterimanya di daerah tersebut disbanding dengan daerah-daerah lain.

Padahal tenaga medis harus lebih m e n g u t a m a k a n sisi kemanusiaan dibanding masalah ekonomi yang sejatinya masih bisa dibicarakan kembali.

Meski demikian, baik Elva maupun Irma berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus seperti peningkatan anggaran yang

bertujuan untuk peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit ini. Hal itu tidak semata untuk memberikan pelayanan terhadap anggota DPR saja, melainkan juga untuk seluruh masyarakat Ambon.



Anggota BURT DPR Irma Suryani Chaniago

RSUD Haulussy merupakan rumah sakit terbesar di provinsi Maluku dan menjadi salah satu rumah sakit provider PT Jasindo. PT Jasindo merupakan perusahaan yang menangani program Jaminan Kesehatan utama (Jamkestama) bagi anggota DPR RI. ■

Komisi V Tinjau Pembuatan Kapal Navigasi di Kepri

Komisi V DPR dipimpin Bakri HM. (F-PAN) didampingi 10 Anggota Dewan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Galangan Kapal PT. Citra Shipyard dan PT. Palindo Marine di Seilekop, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepri. Rombongan meninjau pembuatan kapal Kenavigasian yang dipesan oleh Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Senin (30/5).

Bakri mengatakan, kedatangan-nya ke Batam Prov. Kepulauan Riau untuk melihat secara langsung proses pembuatan kapal yang dipesan Pemerintah di kawasan galangan kapal milik PT. Citra Shipyard dan PT. Palindo Marine.

“Kami ingin mengetahui langsung apakah ada kendala dalam pembangunan kapal,” kata Bakri usai pertemuannya dengan jajaran PT. Citra Shipyard.

Dalam kesempatan ini Komisi V DPR mendapatkan laporan dari manajemen PT. Citra Shipyard bahwa pengerjaan kapal berjalan sesuai dengan rencana kontrak kerja sehingga pengerjaannya sesuai dengan target dan diharapkan selesai tepat waktu. Terkait dukungan dana dewan akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar memberikan dukungan dana sehingga pembuatan kapal tidak menemui kendala.

“Perusahaan perlu dana semaksimal mungkin. Kami akan meyakinkan pemerintah terkait hal ini, dan tentunya kita berharap kebutuhan itu bisa dipenuhi,” katanya.

Manager Operasional PT. Citra Shipyard, Hendri Osvarizal mengatakan, perusahaannya mengerjakan 4 (empat) unit kapal milik Direktorat Perhubungan Laut. Keempat kapal kenavigasian itu adalah 2 (dua) unit kapal pengamat perambuan dengan ukuran 32 meter dengan kecepatan 20 knot. Kapal ini menghabiskan anggaran Rp 68 miliar.

Dua kapal lainnya yakni kapal kelas 1 ukuran 60 meter dengan kecepatan 15 knot menghabiskan anggaran Rp 233 miliar dengan masa pengerjaannya selama 22 bulan. Dua kapal pengamat perambuan akan selesai pada 17 Agustus mendatang.

“Pencapaian pengerjaan sudah 97% untuk dua kapal pengamat perambuan,

dua kapal lagi selesai Juni 2017 mendatang,” kata Hendri dengan menambahkan bahwa dengan adanya aktivitas pembuatan kapal ini Batam kembali menggeliat.

Namun ia tak memungkiri pemesanan pembuatan kapal tahun ini masih kurang dibandingkan tahun sebelum industri galangan kapal terpukul. Dua tahun lalu PT. Citra Shipyard mampu mempekerjakan 8.000 karyawan, namun saat ini hanya tersisa 1.000 orang karena sepi nya order.

Ia berharap, proyek kapal milik pemerintah agar dibuat di galangan kapal di Batam, mengingat SDM dan infrastruk-

tur disini cukup memadai. “Pemesanan kapal masih ada, tapi tidak begitu ramai. Harusnya pemerintah memesan pembuatan kapal di Batam, agar industri galangan kapal disini tetap berjalan dengan baik dan bergairah.” ujarnya.

Sementara itu Anggota Fraksi Partai Gerindra. Novita Wijayanti saat diwawancara Parlemen menjelaskan, Indonesia secara nasional membutuhkan 125 kapal niaga akan bisa tercapai 5 tahun.

“Kita sebagai anggota Dewan tentu

mendukung program transportasi laut itu bisa tercapai secara maksimal dari segala aspek. Namun yang sudah dianggarkan hendaknya bisa terserap jangan sampai tidak bisa

terserap meski ada kendala,” imbuhnya.

Yang menarik, lanjut Novita, kapal yang dipesan tidak hanya untuk Indonesia saja, ternyata juga memproduksi untuk Malaysia. “Ini suatu yang membanggakan apalagi kalau karyawannya semua tenaga kerjanya dari Indonesia, sebab akan mengurangi pengangguran,” tuturnya. ■



Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau pembuatan Kapal Navigasi buatan PT. Citra Shipyard dan PT. Palindo Marine di Batam

Manfaat Konservasi SDA Hayati Harus Dirasakan Masyarakat

Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum WWF, KEHATI, KARE INDONESIA, dan HUMA, dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait pembentukan RUU Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mengatakan bahwa, menjaga konservasi itu berhubungan langsung dengan azas manfaatnya, yakni dimana manfaatnya harus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“RUU ini kita harapkan dapat memperkuat posisi masyarakat, meskipun di kelautan saat ini ada kontradiksi, yakni bukannya masyarakat kita diperkuat tetapi malah diberangus oleh Menteri kita saat ini. Dimana laut dalam dikosong-

Komisi V Tinjau Standar Keselamatan dan Keamanan BRT di Karoseri Laksana, Semarang

Komisi V DPR meninjau pabrik perakitan (karoseri) yang menangani proyek pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) oleh Kementerian Perhubungan Tahun 2015 sebanyak 1000 unit Bus Besar. Kunjungan dimaksudkan dalam rangka memastikan sistem standar keamanan dan keselamatan dalam proses perakitannya di Karoseri PT Laksana, Ungaran, Semarang Jawa Tengah, Senin (30/5).

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia menegaskan bahwa kehadiran anggota Komisi V DPR ke pabrik perakitan BRT PT. Laksana di Ungaran ini dalam rangka melihat langsung standar keamanan dan keselamatan yang diterapkan dalam proses produksi perakitan BRT, apakah sudah dijalankan sesuai standar yang mengacu pada UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap kendaraan bermotor dalam hal ini Bus Rapid Transit harus memenuhi persyaratan teknis



Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau pabrik perakitan Bus Rapid Transit PT Laksana di Semarang.

dan layak jalan karena ini menyangkut standar keselamatan dan keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan sesuai UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” terang Yudi.

Setelah meninjau langsung proses perakitan BRT dari penyiapan rangka hingga finishing bagian interior bus, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengapresiasi sistem kerja, standar keamanan dan keselamatan yang diterapkan di PT. Laksana Karoseri.

“Dari proses perakitan yang kita lihat langsung tadi serta daya dukung

sarana dan prasarana pabrik saya lihat sudah baik. Dari 1000 bus yang dipesan Kemenhub proses produksinya dilaksanakan oleh 7 perusahaan, PT. Laksana Karoseri ini menangani 350 bus, terbanyak diantara perusahaan lainnya maka kita pilih sebagai tujuan Kunspek kali ini,” imbuh Yudi.

Namun demikian, Pimpinan Komisi V DPR ini justru mengkritisi rencana penempatan 1000 Bus Rapid Transit di 8 kawasan perkotaan di Indonesia ini, karena mayoritas bus sebanyak 300 unit diperuntukkan wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

“Jakarta dan sekitarnya ini sudah dikenal sangat macet, kalau ditambah BRT sebanyak itu apa tidak menambah kemacetan. Saya kira perlu ditinjau ulang terkait penyebaran (pembagian) BRT ini agar daerah-daerah yang lebih membutuhkan itu diutamakan,” saran Yudi.

Ikut serta dalam Tim Kunspek Komisi V DPR RI yang dipimpin Yudi Widiana Adia ini Michael Wattimena (Wakil Ketua), Sudjadi, Budi Yuwono, Hj Agati Sulie Mahyudin, Daniel Muttaqien Syafiudin dan Cucun Ahmad Syamsurijal. ■

(foto) Foto: Naqunaji/hr

kan dengan berbagai pelarangan, padahal nelayan-nelayan di laut dalam itulah yang seharusnya banyak dapat membantu dalam konteks menjaga teritorial. Sekarang malah dikosongkan dengan mengandalkan Angkatan Laut, namun kenyataannya masalah pencurian masih saja tetap terjadi,” ujar Daniel Johan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (01/06).

Menurutnya, banyak daerah yang merasa seakan-akan perlindungan terhadap hutan dan hewan tersebut jadi faktor penghambat bagi daerah, untuk membuat masyarakat sekitarnya sejahtera.

Ditambahkan, ada suatu kondisi seakan-akan hewan dan hutan versus

manusia, yang memang tantangannya adalah berujung pada masalah kemiskinan. Daerah yang menjaga hutannya harus punya kemampuan lebih untuk mensejahterakan rakyatnya, ketimbang yang tidak menjaga hutan.

“Benang merah yang menjadi tugas dan tantangan kita bersama adalah mewujudkan konservasi sebagai sumber untuk mensejahterakan masyarakat. Indonesia memiliki kekayaan aneka ragam hayati yang merupakan rahmat bagi kita dan tidak dimiliki oleh negara lain. Persoalannya apakah kita bisa memproteksi secara penuh kekayaan kita itu,” tandas politisi F-PKB Dapil Kalbar tersebut. ■



Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan

(dep.mp) foto: jakar/hr

Pemerintah Pusat Diharapkan Beri Perhatian Khusus pada Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menganjurkan kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus kepada Kota Batam. Hal ini sangat beralasan karena Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis.

Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapura dan Selat Malaka.

Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau. “Batam ini perlu perhatian pemerintah pusat dalam pendanaan. Injeksi pendanaan PNBPNya sendiri 600 sampai

700 miliar. Tapi injeksi pemerintah hanya 200 miliar.kecil sekali,” ujar Azam.

Hal tersebut diungkapkan Azam pada acara diskusi yang bertajuk “Refleksi Atas Revisi UU BUMN dan Proyeksi Batam Sebagai Kota Industri,” yang termasuk dalam rangkaian acara Press Gathering dengan Wartawan Koordinatoriat DPR di Batam, Jumat (27/5) malam. Turut hadir unsur pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan kembali, bahwa Presiden ke-3 Indonesia BJ. Habibie memproyeksikan Batam sebagai kota yang bisa menandingi negara Singapura dalam bidang Industri. Dengan hal itu pemerintah harus cakup mengelola kota strategis ini.

“Kalau memang berpihak pada Batam sebagaimana cita-cita Habibie lalu, pemerintah harus menginjeksi yang luar biasa kepada

Batam, disertai pengawasan yang luar biasa. Yang diharapkan Habibie sebagai counterpart negara seberang. Tetapi kalau separo-separo, maka hilang begitu saja,” ungkap Azam penuh harap.

Dia juga menyinggung soal kewenangan pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau yang sering disebut BP Batam. Menurutnya jangan sampai persoalan pengelolaan BP Batam menjadi masalah yang kontra produktif. Dia mengharapkan Batam bisa menjadi kota industri pelabuhan yang maju, sehingga bisa menandingi Singapura.

“Pak Wali Kota, jangan sampai masalah kewenangan, antara pemkot dengan BP Batam, menjadi hal yang kontra produktif. Ini yang kita lihat selama BP Batam menjadi mitra Komisi VI. Bahwa ada hal-hal yang kontra produktif antara Badan Pengelola Kawasan Batam dengan pemerintah kota, ini yang perlu diselesaikan. Tidak bisa Batam ini dibiarkan begitu saja. Lama-lama bisa tidak jelas,” keluh Azam. ■



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana

(eko,mp),foto: jaksa/hr

Ketersediaan Pangan Saat Ramadhan Harus Diatasi dengan Solusi Permanen



Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima

Ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau selalu menjadi masalah klasik kala datang bulan suci Ramadhan sampai Hari Raya Lebaran tiba. Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima, mewanti-wanti sedari dini agar masalah tersebut bisa ditemukan solusinya, sehingga di kemudian hari tak terulang lagi.

DPR Desak BPJS Kesehatan Sosialisasikan Mekanisme Pemberian Kompensasi

Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan mekanisme pemberian kompensasi kepada peserta yang tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan karena di daerahnya belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat sesuai dengan Perpres No.111 Tahun 2013 Pasal 34 dan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 30.



Pimpinan Komisi IX DPR dan Dirut BPJS

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri saat RDP dengan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris beserta jajarannya di Gedung

Nusantara I, Jakarta, Selasa (31/05).

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi IX mendesak BPJS Kesehatan segera menyelesaikan kriteria teknis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan peserta dalam proses pemerataan

Menurutnya, permasalahan itu harus diatasi dengan solusi yang bersifat permanen, yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Permasalahan yang diatasi dengan cara yang tidak tepat bisa jadi hanya menutup masalah untuk sementara waktu, dan akan timbul masalah yang sama di kemudian hari.

“Ketersediaan pangan untuk mencukupi ramadhan dan lebaran, pemerintah harus mengacu pada konsep makronya dalam kaitan kita mengarah pada kedaulatan pangan,” ungkap Aria, saat diwawancarai di Gedung Nusantara I, tidak lama ini.

Dia menegaskan, agar pemerintah jangan selalu membuat panik heboh masyarakat. Menurutnya mengimpor kebutuhan bahan pokok bukanlah solusi

permanen, itu hanya bisa mengatasi masalah untuk sementara waktu. “Sehingga semuanya diselesaikan dibikin impor-impor dan impor, gampang,” ketus Aria.

Dia menilai kebijakan impor bahan pangan untuk kebutuhan dalam negeri adalah cara yang tidak cerdas. Menurutnya pemerintah harus mencari cara agar negara bisa memenuhi secara mandiri, segala kebutuhan dalam negeri. “Impor aja semua. Gak perlu cerdas-cerdas amat menyelesaikan hal itu,” sindir Aria.

Dia mengatakan, kebijakan impor harus diperhitungkan lagi, harus ada solusi cerdas mengatasi masalah ketersediaan pangan. “Contohnya hari ini, harga gabah di tingkat petani, jeblok. Harga kering panen, harga kering hilir, jeblok kabeh. Terus gimana mensikapinya?” keluh Aria. ■

peserta di FKTP sehingga tidak terjadi *overcapacity* di satu FKTP.

Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk membuka seluas-luasnya pendaftaran FKRTL sebagai *provider* BPJS Kesehatan sesuai dengan persyaratan kredensialing yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, papar Syamsul, Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk terus melakukan sosialisasi kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terkait implementasi dari Permensos No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Persyaratan Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang baru saja dikeluarkan tanggal 9 Mei 2016.

Kemudian, dalam rangka menyusun konsep terkait *Coordination of Benefit (CoB)*, jelas Syamsul, Komisi IX DPR meminta BPJS Kesehatan untuk tetap memperhatikan peserta yang mengikuti program CoB agar memperoleh manfaat yang jelas dan tidak merugikan peserta.

Lebih lanjut, Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan agar meningkatkan kualitas verifikator di lapangan dan mempersingkat waktu verifikasi klaim, sehingga tidak menghambat pembayaran klaim FKRTL.

Komisi IX DPR meminta BPJS Kesehatan untuk melaksanakan rekomendasi Panja BPJS Kesehatan Komisi IX terkait pelaksanaan audit investigasi secara menyeluruh, antara lain terhadap dana kapitasi, biaya operasional BPJS kesehatan, Dana Jaminan Sosial yang berasal dari APBN, dan kepesertaan PBI.

Terakhir, Komisi IX DPR meminta BPJS Kesehatan untuk bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tarif INA CBGs, yaitu melakukan rasionalisasi terhadap tarif INA-CBGs dengan mempersempit kesenjangan tarif antara tipe RS pemerintah dan memberikan perbedaan standard tarif RS swasta serta reklasifikasi kasus penyakit pada setiap *casemix group* secara berkesinambungan. ■

(foto) foto : Naufurroqii/hr

(mm) foto : Jayadi/hr

Pemerintah Perlu Perhatikan *Overcapacity* Peserta BPJS Kesehatan di FKTP

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan *overcapacity* yang mencapai 110 ribu peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang salah satunya terjadi di daerah Cengkareng perlu menjadi perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah.

Hal ini diungkapkan Dede saat Komisi IX menggelar RDP dengan Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (31/5).

“*Overcapacity* peserta BPJS ini perlu mendapat perhatian, karena hal ini memberatkan biaya kapitasi yang diberikan kepada FKTP setiap bulannya. Misalnya saja biaya kapitasi untuk membayar tenaga kesehatan Rp 6 ribu dikalikan dengan 110 ribu pasien berarti perbulan harus mengeluarkan 800 juta hanya untuk FKTP. Apalagi ada batas FKTP paling banyak melayani 10 ribu peserta BPJS Kesehatan dengan rasio tenaga kesehatan melayani pasien 1:5000,” terangnya.

Menurut Dede, perlu peran pemerintah pusat dan daerah untuk men-



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menerima dokumen dari Dirut BPJS

distribusikan tenaga kesehatannya agar tidak menumpuk di satu titik saja, dan juga perlu membuka FKTP baru agar bisa mendistribusikan peserta ke FKTP lain.

“Pemerintah daerah harus turut serta terkait masalah ini untuk mendistribusikan peserta ke FKTP lain, mungkin juga bekerja sama dengan RS swasta, agar tidak terjadi *overcapasitas*. BPJS juga perlu ikut mendistribusikan peserta di FKTP yang jumlahnya terlalu banyak, karena memiliki kewenangan berdasarkan peraturan Permenkes,” tegasnya.

Selain itu, disini Politisi Partai Demokrat ini juga menjelaskan mengenai

dana kompensasi yang akan diberikan BPJS Kesehatan kepada peserta BPJS yang akan berobat diluar FKTP dimana namanya terdaftar.

“Hal ini bisa dilakukan asal, peserta melapor ke FKTP daerah asalnya. Misalnya di sebuah daerah disana tidak ada FKTP lalu orang mau berobat disana tidak terlayani maka BPJS menyiapkan pengganti bisa dia dikirimkan ke puskesmas lain atas biaya BPJS, bisa dikirimkan dokter atau tenaga kesehatan kesana atau bisa juga pasien berobat di tempat lain dan diganti BPJS Kesehatan, ini hanya masalah administrasi saja,” tuturnya. ■

(rnm), foto:igiyadi/ruw

Komisi X DPR Harapkan Pariwisata Menjadi Pilar Devisa Negara



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fiqib.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fiqih mengatakan dirinya berharap pembangunan pengembangan pariwisata menjadi pilar penerimaan devisa negara, dan menjadi posisi ketiga setelah kegiatan *export import* dan perdagangan jasa.

“Target pemerintah pada tahun 2016 dan tahun selanjutnya, devisa pariwisata diharapkan naik ke- posisi 3 besar pendapatan negara,”katanya saat tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Plt Bupati Pulau Morotai Weni R. Paraisu dan jajarannya, di Ternate, Jum’at (27/5).

Lebih lanjut, menurut Abdul Fikri, untuk mencapai hal itu, APBN 2016 mengalokasikan anggaran pemasaran pariwisata mancanegara yang meningkat hampir 300 persen, sehingga ini menjadi kepentingan nasional yang akan berdampak

Panja Pariwisata Komisi X Identifikasi Pengembangan Pariwisata Mandalika

Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Nusa Tenggara Barat, guna mendapatkan gambaran permasalahan implementasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, serta data dan fakta capaian kinerja pengembangan pariwisata di wilayah Lombok Tengah, khususnya di daerah Mandalika, NTB.



Suasana rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR dengan Pemerintah Kota di NTB

“Selain untuk memetakan dan mengidentifikasi strategi pengembangan pariwisata juga untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan rekomendasi Panja Komisi X,” ujar Teuku Riefky Harsya selaku Ketua Tim Kunker Spesifik sekaligus Ketua Komisi X DPR saat memberikan sambutan rapat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jum’at (27/5).

Hadir dalam acara ini Dadang Rizki Ratman, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar RI, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Perwakilan dari PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), Kadin Kebudayaan dan Pariwisata NTB, serta

beberapa Organisasi Kepariwisata.

Teuku Riefky mengatakan, Komisi X DPR RI telah membentuk Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata pada tanggal 13 April 2016, yang merupakan amanat Keputusan Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI.

“Yang menjadi latar belakang pembentukan Panja ini antara lain adalah adanya pembangunan pengembangan pariwisata Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pilar penerimaan devisa negara hingga mampu mencapai posisi ketiga selain kegiatan ekspor dan perdagangan jasa,” jelasnya.

Menurutnya, selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, devisa pariwisata terhadap 11 ekspor barang

terbesar menduduki posisi lima besar setelah minyak dan gas bumi, batu bara, kelapa sawit, dan karet olahan. Untuk periode tahun 2013 dan tahun 2014, devisa pariwisata naik ke posisi keempat setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan kelapa sawit.

Sementara untuk tahun 2015 sedang dalam proses perhitungan dan penyusunan laporan. Dan target Pemerintah untuk tahun 2016 dan pada tahun selanjutnya, devisa pariwisata diharapkan dapat naik menjadi posisi ketiga.

Untuk mencapai hal itu, APBN 2016 mengalokasikan anggaran pemasaran pariwisata mancanegara meningkat hampir 300% dibandingkan dengan tahun 2015. Anggaran tahun 2016 adalah sebesar 2,955 triliun rupiah, sementara untuk tahun 2015 sebesar 1 triliun rupiah.

“Dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, maka pengawasannya juga perlu ditingkatkan agar penggunaan anggaran tersebut dapat diidentifikasi dan ditelusuri secara akurat yang pada akhirnya penggunaan anggaran tersebut adalah rasional dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan, dan Mandalika merupakan 1 dari 10 destinasi baru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.” tutur politisi partai Demokrat tersebut.

Ikut serta dalam Tim Kunspek ini adalah Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah, anggota Komisi X Ridwan Hisyam, Mujib Rohmat dari FPG, Asdi Narang, Wayan Koster, My Esti Wijayati (F-PDIP), Jamal Mirdad (F-GERINDRA), Venna Melinda ((F-PD), Helmy Faisal Zaini (F-PKB), dan Surahman Hidayat (F-PKS). ■

multifier efek terhadap Maluku Utara khususnya Morotai.

“Sedangkan di tahun 2013 dan tahun 2104, devisa pariwisata naik ke posisi keempat setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan kelapa sawit,” terangnya.

Ia menambahkan, anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp 2,955 triliun sementara untuk tahun 2015 sebesar Rp 1 triliun, “Dengan alokasi anggaran yang meningkat hampir 300 persen tersebut, pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisman terus bertambah dari tahun ke tahun,” pungkasnya.

Dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, jelas Abdul Fikri, maka pengawasannya juga perlu ditingkatkan agar pengguna anggaran tersebut dapat diidentifikasi dan ditelusuri secara akurat

yang pada akhirnya pengguna anggaran tersebut rasional dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, bahwa dalam kaitan yang dimaksud, Komisi X DPR RI menilai perlu membentuk panja pemasaran dan destinasi pariwisata.

Sebagaimana diketahui, selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, devisa pariwisata terhadap 11 ekspor barang terbesar menduduki posisi lima besar setelah minyak dan gas bumi, batu bara, kelapa sawit, dan karet olahan.

Kunjungan Spesifik kali ini dikuti pula oleh, Junico B.P. Siahaan (F-PDIP), Bambang Sutrisno (F-PG), Nuroji (F-Gerindra), Muslim (F-PD), Anang Hermansyah (F-PAN), Krisna Mukti (F-PKB) dan SY. Anas Thahir (F-PPP). ■

(aekal, foto: ryan/hr)

Saatnya Berdayakan Kembali Partisipasi Politik Perempuan

Diskriminasi gender masih banyak ditemukan. Sifat dan tingkat diskriminasinya bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Kesenjangan gender berupa kesempatan berkiprah di panggung politik bagi perempuan masih menyisakan masalah. Saatnya memberdayakan kembali partisipasi politik perempuan di tingkat nasional maupun internasional.



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua BKSAP Tantowi Yahya.

Demikian terungkap dalam Seminar on Promoting Gender Justice and Rule of Law Through Regulations at the National Level di DPR RI, Kamis (26/5). Seminar ini digelar oleh BKSAP DPR bekerja sama dengan Parliamentarians for Global Action (PGA). Seminar yang dibagi tiga sesi ini, membincang partisipasi perempuan dari berbagai perspektif.

“Promosi keadilan dan kesetaraan gender harus melampaui batas. Banyak instrumen internasional tentang keadilan dan kesetaraan gender termasuk *developmental frameworks*-nya yang diadopsi dalam implementasi kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas atau

keajiban negara untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia,” tutur Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dalam sambutan pembuka seminar.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP Tantowi Yahya (F-Golkar) mengutarakan pentingnya kesetaraan gender dalam hukum dan norma internasional. Konkritnya, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkarya tidak hanya di politik tetapi seluruh aspek. Selain itu, perlindungan hukum terhadap perempuan juga penting agar kiprah perempuan bisa lebih maksimal.

“Forum ini membahas tentang upaya yang perlu dilakukan oleh legislator dalam membela hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan yang

harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama dalam seluruh bidang termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” jelas Tantowi.

Ia melanjutkan, di Parlemen sendiri implementasi kesetaraan gender tidak mudah untuk dilaksanakan, terlihat dengan kurangnya figur perempuan dalam parlemen. “Regulasi kita memandatkan presentasi wanita harus mencapai 30 persen tetapi kita hanya bisa 17 persen,” ungkap politisi Golkar tersebut.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai angka 30 persen berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan yang dianut sebagian besar masyarakat sehingga diperlukan suatu perubahan cara pandang.

“Mengapa target ini sulit dicapai karena budaya mereka, agama mereka, dan norma-norma yang kita tahu di beberapa tempat di Indonesia, perempuan tidak didukung untuk menjadi politisi karena mereka menganggap politisi hanya untuk laki-laki. Paradigma ini yang harus diubah,” tegas Tantowi.

Berkaitan dengan hal tersebut, berpandangan Tantowi, mandat regulasi bisa dicapai jika setiap partai politik proaktif dalam mempromosikan bahwa eksistensi perempuan dalam Parlemen sangat dirindukan untuk menyuarakan hak-haknya. “Kehadiran perempuan dalam parlemen akan memberikan warna yang berbeda, *it's gonna be different, the passion is very different*,” jelasnya. ■

(anna.mp), foto:jabar/dr

RUU Karantina Langkah Preventif Lindungi Bangsa

Badan Legislasi (Baleg) DPR mendalami Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekekarantinaan Kesehatan. Dikemukakan, RUU usulan pemerintah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi warna negara Indonesia dari penyakit-penyakit menular yang berasal dari masuknya warna negara asing.



Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas

“RUU ini adalah langkah preventif kita untuk melindungi bangsa. Melindungi kepentingan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan terjangkitnya penyakit menular,” ungkap Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Senayan, Senin (30/5).

Diketahui perkembangan saat ini, jelas Supratman, penyelenggaraan tindakan kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara hanya mengatur kekarantinaan di pelabuhan dan bandar udara. Padahal, kebutuhan penyelenggaraan

kekarantinaan kesehatan juga diperlukan di pos lintas batas darat negara dan wilayah.

Adapun beberapa poin yang menjadi catatan khusus dalam pembahasan RUU ini diantaranya, pertama belum adanya pengaturan tentang kekarantinaan di pos lintas batas darat negara, pengaturan zona karantina kesehatan wilayah.

Kedua, terbatasnya sumber daya dan kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Ketiga, belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar imigrasi dalam pelaksanaan tugas *quarantine, immigration, custom and port* (QICP). Serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Ia menilai, sanksi yang berlaku sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Diharapkan pada akhir persidangan ini sudah bisa diambil keputusan untuk disahkan di paripurna,” optimis Politisi Gerindra ini. ■

(ann.mp), foto: jayadi/br

Baleg Setuju Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR setuju peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di kawasan MPR, DPR, dan DPD untuk disahkan di Paripurna berikutnya. Sebagaimana objek vital nasional lainnya, maka seharusnya yang bertanggung jawab dalam keamanan lingkungan parlemen adalah aparat keamanan.

“Kita sudah memutuskan peraturan DPR terkait dengan pengamanan di gedung DPR, baik di rumah-rumah jabatan pimpinan maupun anggota. Intinya, peraturan ini akan menjadi payung hukum agar bisa menjaga kawasan parlemen secara *security* bisa dipertanggungjawab-

kan terutama dari ancaman dan gangguan,” papar Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto usai memimpin Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR, Selasa (31/5).

Lebih lanjut, politisi PAN ini mengutarakan, meskipun sistem keamanan gedung parlemen diperketat, namun tidak akan menjauhkan para wakil rakyat dengan konstituennya. “Hal ini sekaligus memberikan jaminan bahwa DPR akan tetap menjadi rumah yang aman bagi rakyat.



Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto

Tidak akan ada hambatan bagi DPR dalam melayani masyarakat,” ungkap Totok.

Masih dijelaskan Totok, dengan berlakunya sistem keamanan terpadu diharapkan semua aktivitas di gedung parlemen terpantau dengan baik. Keamanan terpadu akan melibatkan kepolisian yang terintegrasi dengan keamanan regional Polda.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (F-Golkar) juga menyatakan mengenai sistem keamanan terpadu akan menjadi kewenangan kepolisian. Sementara itu, walaupun ada pembagian wewenang di antara 3 lembaga negara, yakni DPD, DPR dan MPR akan tetap dalam satu komando.

Pada akhir rapat, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya dan memberikan pandangan mini fraksi kepada pimpinan rapat secara tertulis. ■

(ann.mp), foto: Jayadi/br

Komisi V DPR Apresiasi Kabupaten Karangasem Maksimal Serap Dana Desa

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dalam memaksimalkan pemanfaatan dana desa.



Ketua Komisi V Fary Djemy Francis.

Hal tersebut terungkap disela-sela Komisi V DPR meninjau pasar tradisional Karangasem, Bali, Senin (30/5).

“Dana desa merupakan program pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan dari akarnya, mengingat

Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang dianggap masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa kabupaten dan wilayah-wilayah yang ada di Bali,” ujar Fary.

Lebih lanjut, Fary menginformasikan bahwa Komisi V DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Pedesaan dan Pem-

angunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan program yang disebut dengan PISAW atau program infrastruktur sarana antar wilayah.

Sementara itu, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa yang menerima rombongan Komisi V DPR berharap bisa menjembatani usulan dan masukan masyarakat Karangasem sebagaimana program Presiden RI yang akan membangun infrastruktur sarana dan pembangunan dari daerah-daerah yang tertinggal.

“Saya rasa tepat sekali jika Komisi V mengadakan kunjungan ke daerah ini, karena Komisi V berkaitan dengan pembangunan desa, tentu kalau desanya maju, kecamatan akan maju juga,” jelas I Wayan.

Dalam kunjungan spesifik yang dipimpin oleh Fary Djemy Francis (F-Gerindra) diikuti juga anggota Komisi V lainnya yakni Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), H.M. Salim Fakhry (F-PG), Ade Rezky Pratama (F-Gerindra), Anton Sukartono Suratno (F-PD), Sungkono (F-PAN), H.Alamuddin Dimiyati Rois (F-PKB), Fatmawati Rusdi (F-PPP). ■

(nt, azka), foto: azka/hr

Legislator Anjurkan Presiden Terbitkan Perppu Darurat Hakim

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani minta lembaga penegakan hukum yang merupakan salah satu unsur dari *trias politika* harus lebih suci dibandingkan dengan eksekutif dan legislatif. Menurutnya lembaga yudikatif punya peran sangat penting dalam menjaga kehormatan negara.

Arsul menganjurkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang bertujuan agar men-



Anggota Komisi III DPR Arsul Sani bersama Hakim Agung Gayus Lumbun

jadikan lembaga peradilan di Republik Indonesia bersih dan berwibawa.

“Jika presiden melihat banyaknya kasus hakim termasuk di MA tersangkut korupsi. Kalau ini dibiarkan bisa melumpuhkan negara, maka Presiden bisa menerbitkan Perppu Darurat Hakim. Apalagi jika korupsi itu sudah mendarah-daging, maka perlu langkah-langkah radikal untuk perbaikan,” anjur Arsul.

Anjuran yang ditujukan kepada Presiden tersebut dia sampaikan saat acara Dialektika Demokrasi yang bertajuk ‘Lembaga Peradilan dalam Pusaran Korupsi’. Selain Anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan peradilan, turut menjadi pembicara, Hakim Agung MA Gayus Lumbun, dan anggota Ombudsmen Laode Ida di Gedung DPR

RI Jakarta, Kamis (26/5).

Bahkan Arsul menyampaikan jika diperlukan, Indonesia melakukan reformasi peradilan. Hal ini sangat beralasan karena belakangan ini banyak kasus yang terkuak tentang kerusakan lembaga yudikatif ini.

Dalam lini media masa banyak diberitakan ada puluhan hakim yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap. Bahkan Sekjen Mahkamah Agung (MA), Nurhadi juga diperiksa, kantor dan kediamannya digeledah, terkait dugaan keterlibatannya dalam praktek mafia peradilan. Apalagi uang senilai Rp 1,7 miliar berhasil disita saat pengeledahan kediamannya.

Sampai-sampai politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan, reformasi peradilan lebih

urgen dari pada reformasi politik saat ini. Dia menyampaikan, kasus di tubuh MA yang baru-baru ini terungkap, hanya sebagian saja, banyak permasalahan yang belum diketahui publik. “Fenomena di MA itu fenomena gunung es,” ungkapnya.

Arsul juga menyampaikan, aduan yang diterimanya, dari hakim-hakim yang masih menjaga integritasnya dengan baik merasa terganggu dengan kasus tersebut. “Ini yang kemudian harus kita benahi,” paparnya.

Dia juga menyarankan di kemudian hari sebaiknya ada aturan yang menjaga hakim patuh terhadap standar etik. Menurutnya standar etik seorang hakim harus tinggi. “Hakim Agung setiap lima tahun dilakukan penilaian oleh Komisi Yudisial. Untuk menjaga martabat dan keluhuran MA,” usul Arsul. ■

(keo), foto: nafjunodj/hr

Isu Paling Krusial Batam, Pembagian Kewenangan Badan Pengusahaan dan Pemkot

Dengan ditetapkannya Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maka akan ada pembagian kewenangan yang jelas antara Badan Pengusahaan Kawasan dan Pemerintah Kota.

Pemkot berwenang mengurus rakyat dan Badan Pengusahaan Kawasan mengurus investasi termasuk kawasan industri. “Kalau PP keluar sekitar 6 bulan lagi, insya Allah Batam akan menjadi lebih baik,” kata Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Batam Gitoyono Batong dalam acara Press Gathering wartawan parlemen di Batam, Jumat (27/5) lalu.

Sebelumnya dia mengatakan, isu paling krusial di Batam soal pembagian kewenangan antara Pemkot dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Hal ini terjadi menyusul tahun 2001 dengan adanya UU No.53 tentang keberadaan Batam sebagai kota Otonomi.

“Disinilah puncak masalahnya sebab salah pasalnya mengatur, Batam sebagai Kota Otonomi mengikutsertakan Otorita Batam. Barang yang diikutsertakan berarti tunduk pada Pemerintah Kota, tapi faktanya tidak. Disitu diamanahkan bahwa untuk tugas selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah. “Sampai detik ini PP tidak

muncul-muncul, itu puncak masalah,” tandas Gitoyono.

Soal kewenangan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat Kepri dan Batam khususnya yang selama ini selalu menikmati barang dari luar negeri, sekarang *dicut* (diputus). Akibatnya beras lebih mahal jika mendatangkan dari Jawa. Kalau beras premium dari Thailand di Batam Rp 7000, dari Cipinang Rp 13.000. Makanya lanjut dia, Batam inflasi tinggi, juga harga gula cukup mahal.

Menurut Gitoyono, sejak sebelum merdeka keluarganya mendatangkan barang dari luar dan itu hal biasa. Apalagi Batam tidak memiliki lahan pertanian sehingga memang tidak untuk pengembangan pertanian sehingga semuanya didatangkan dari luar.

“Karena itu saya berharap Komisi VI DPR bersama Komisi lainnya bisa membahas dengan Kemendag mohon perhatian inflasi di Batam tinggi. Bawang saja harus mendatangkan dari Jember yang selama ini lebih murah dari Cina. Hal inilah yang perlu diceritakan dan keluhan masyarakat Kepri dan Batam khususnya,” terangnya kepada hadirin termasuk Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana.

Sementara itu Asisten II Pemprov Kepri Edi Sumbaryadi menyampaikan terima kasih atas digelarnya Press Gathering wartawan parlemen termasuk kehadiran Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua Komisi VI Azam

Azman Natawijana. Dia berharap selain di Batam bisa juga mengunjungi Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjung Pinang. Sebab

semua Presiden RI kalau berkunjung ke Batam juga mengunjungi Pulau Penyengat di kawasan Tanjung Pinang. ■

(mp), foto: jpkab/hr



Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Batam Gitoyono Batong.

Perlu Kehadiran Negara dalam Penanggulangan Terorisme

Kehadiran negara dalam menanggulangi tindak pidana terorisme belum dirasakan, khususnya kepada para korban bom. Berdasarkan temuan Aliansi Indonesia Damai (AIDA), terdapat 1.096 korban tewas dan luka sejak peristiwa Bom Bali 1 yang belum merasakan kehadiran negara dalam merangkul para korban.

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Forum Pembela Islam (FPI), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Aliansi Indonesia Damai (AIDA) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

“Kita apresiasi narasumber atas rincian yang mereka sampaikan terkait poin-poin apa yang harus direvisi dan ditambahkan dalam Rancangan Undang-undang ini. Misalnya, harus menambahkan perlindungan kepada korban bom maupun korban kesalahan prosedur. Ada orang yang ditangkap, disiksa ternyata tidak terbukti, ini perlu menjadi perhatian kita khususnya negara,” tutur Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (F-Gerindra) usai memimpin RDPU dengan beberapa *stakeholder* di Gedung DPR RI, Selasa (31/5).

Ia menjelaskan, para narasumber juga meminta perlunya direvisi pasal-pasal karet agar tidak menjadi salah tafsir dikemudian hari. “Tentang pasal-pasal karet tentang ekspresi, ucapan, masa penahanan, dan eksisting saja 180 hari sudah dianggap luar biasa malah minta ditambah sampai 510 hari,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso meminta agar DPR memastikan UU yang akan disetujui mampu mendeteksi, mencegah dan menanggulangi terorisme secara efektif dan juga menjamin aspek-aspek hak sipil atau hak asasi manusia tetap dihormati.

“Semangat pemerintah memang tegas revisi UU ini, ICMI tidak keberatan tetapi jangan sampai ada pasal-pasal yang bersifat multitafsir, pasal-pasal karet yang



Suasana RDPU Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

bisa diterjemahkan lain oleh penguasa,” jelas Priyo

Selain itu, ia mengungkapkan pembelaan terhadap korban juga perlu menjadi perhatian khusus. “Tadi saya tersentuh beberapa pengakuan dari korban bom, ternyata negara alpa dan tidak memberikan perhatian secukupnya,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani mengutarakan pentingnya kehadiran dewan pengawas yang akan berfungsi mengawasi kinerja dan memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi pemberantasan terorisme.

Adapun Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan masukan

terkait klausul pencabutan kewarganegaraan, apabila masih dengan rumusan yang sama, maka sebaiknya ketentuan pencabutan kewarganegaraan dihapuskan.

ICJR berpendapat, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak.

“Menurut mereka, perlu direvisi pencabutan warga negara (*stateless*) yang melanggar hukum internasional karena *stateless* siapa yang akan melindungi warga negara itu,” tutur Syafi'i. ■

(ann.mp) foto: Iyudati/hr

Anggaran 2017 Diharap Memprioritaskan Pertanian dan Kebutuhan TNI Polri

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah memberikan catatan terkait dengan pidato Menteri Keuangan RI atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2017 saat Rapat Paripurna DPR.

Menurutnya ada dua sektor yang harus menjadi perhatian utama untuk membunikan Nawa Cita pemerintah. Pertama memprioritaskan anggaran pada pertanian, kedua memenuhi kebutuhan minimum TNI dan

Polri.

Menurutnya, dengan memberikan prioritas anggaran kepada sektor pertanian, cita-cita kedaulatan pangan yang ditargetkan pada 2018 bisa terwujud. “Maka mau tidak mau pemerintah harus memberikan prioritas kepada pertanian, sehingga kedaulatan pangan yang mau dicapai 2018 akan terpenuhi,” ungkap Said saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, belum lama ini.

Selain itu, menurut Said, pemerintah juga tidak bisa menghindar dari pemenuhan kebutuhan minimal TNI dan Polri. “Pemerintah punya kewajiban harus menyelesaikan kebutuhan minimum

Press Gathering Bangun Silaturrahim Untuk Penguatan DPR

Untuk kesekian kalinya Setjen DPR menggelar acara *Press Gathering*, kali ini di Batam, Kepulauan Riau. Sekjen DPR Winantuningtyas Titi Swasanany mengatakan, dalam *Press Gathering* ini acaranya selalu dikemas sersan-serius tapi santai, namun memperkuat kerja sama membangun silaturrahim yang tidak putus supaya ada kesepahaman bersama atas posisi masing-masing dalam rangka penguatan kelembagaan DPR.



Sekjen DPR Winantuningtyas Titi Swasanany dalam acara *Press Gathering* wartawan koordinator DPR RI

Hal itu dikatakan Win-panggilan Sekjen DPR pada acara *Press Gathering* di Batam, Jumat (27/5) malam. Hadir dan membuka acara ini Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua Komisi Azam Azman Natawijana, Eko Sumbarjadi mewakili Gubernur Kepri dan Gitoyono mewakili Walikota Batam.

Dari jajaran Setjen hadir Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson

Rajagukguk, Irtama Setyanta Nugraha, Deputy Persidangan Damayanti dan Kepala Biro Pemberitaan Suratna serta Kepala Biro Persidangan Helmizar dan sejumlah Pejabat Setjen DPR RI lainnya.

Menurut Win, pada acara ini temanya agak substantif, membahas salah satu RUU yang sedang dibahas di DPR supaya teman-teman pers sudah bisa diajak diskusi bersama. Adapun temanya “Refleksi Atas Revisi UU BUMN dan

Refleksi Batam Sebagai Kota Industri”. RUU ini sedang dibahas Komisi VI dan tempatnya disesuaikan dengan tujuan Batam Sebagai Kota Industri dan slogannya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani. “Diharapkan pemikiran bersama kita untuk kontribusi bagi kemajuan Batam dalam kompetisi era perekonomian global,” ajak Sekjen DPR.

Ditambahkan, *Press Gathering* merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan sejak tahun 2009. Sebelum 2015 hanya setahun dua kali, dan sejak 2015 dan 2016 ini diadakan setahun 4 kali. “Sebelumnya di Bogor dan sekarang di Batam. Kita mengikuti aspirasi teman-teman wartawan,” jelas Win dengan menjelaskan bahwa acara kali ini diikuti 100 wartawan baik media cetak maupun elektronik.

Ia mengapresiasi kerja sama yang baik selama ini antara Sekjen dan BKD sebagai unsur pendukung DPR dengan wartawan Koordinatoriat DPR. Diharapkan komunikasi dan kerja sama bisa ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang dengan tujuan yang sama, terciptanya sinergi bagaimana ada program-program untuk penguatan DPR-RI.

“Tentu melalui peran media melalui informasi dan edukasi dengan pemberitaan yang utuh mengenai proses bagaimana DPR melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Irendy Kasmara selaku Pengurus Wartawan Koordinatoriat DPR dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Sekjen dan Kepala Biro Pemberitaan yang telah memfasilitasi acara ini sekaligus sebagai bagian *refreshing* sebab sehari-hari selalu diotak-atik dengan berita kadang membuat stres.

“Kami bersyukur sudah ada sinergitas yang baik antara wartawan dengan DPR. Di bawah kepemimpinan Pak Akom tidak ada gonjang-ganjing yang luar biasa hanya riak-riak kecil. Pertanda sudah ada *chemistry*, sudah ada ikatan emosional cukup baik yang dibangun antara wartawan dengan DPR. Sejauh ini tidak ada *gap* sebab komunikasi dengan Pak Akom juga cukup cair,” kata Irendy menambahkan. ■

Tentara Nasional Indonesia kita, dan Kepolisian Republik Indonesia,” saraan Said.

Dia mengatakan dua sektor di atas merupakan bagian yang penting untuk diingatkan oleh DPR kepada pemerintah. Terkait dengan dana desa dia mempersilahkan untuk ada penambahan, karena membangun Indonesia dari pinggir juga bagian dari Nawa Cita.

“Kami *welcome* untuk penambahan alokasi dana desa, karena ini merupakan Nawa Cita yang ingin membangun Indonesia dari pinggir. Namun sistem dan tata kelola di desa harus dibenahi,” ujar



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah

Said.

Terkait dengan poros maritim, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, menyarankan pemerintah agar mendahulukan infrastruktur primer dalam pembangunannya. Infrastruktur yang dia maksud untuk mendukung swasembada kedaulatan pangan Indonesia.

“Infrastruktur yang mendukung terwujudnya poros maritim. Infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah infrastruktur primer. Dalam rangka mendukung swasembada atau kedaulatan pangan,” Said menyarankan. ■

(eko), foto: rani/br.

(mp), foto: yuyadi/ra.

Laporan Keuangan Berbasis Akrual Sebagai Pertanggungjawaban Kepada Negara

Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Program Pelatihan Mandiri (PPM). Pelatihan ini mengangkat tema 'Review Laporan Keuangan Berbasis Akrual'. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapabilitas auditor di lingkungan Irtama Setjen DPR.

Narasumber pelatihan, Arsita Putri Winanda menjelaskan laporan keuangan berbasis akrual bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada negara. Karena menurutnya anggaran yang digunakan dalam lembaga pemerintahan bersumber dari APBN. "Ini adalah bentuk pertanggungjawaban," ujarnya kepada audiens pelatihan di ruang rapat Irtama, Rabu (1/6).

Akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Dengan demikian pencatatan

dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan.

Akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi



Suasana acara program pelatihan mandiri yang diselenggarakan Inspektorat Utama Setjen DPR RI

berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas.

Arsita mengungkapkan, tahun 2014 merupakan tahun terakhir penerapan basis kas menuju akrual di lingkungan lembaga Negara. Dia juga menjabarkan, ada lima pelaksanaan review laporan keuangan,

pertama laporan realisasi anggaran, kedua laporan operasional pendapatan.

Ketiga laporan operasional beban, keempat laporan

perubahan ekuitas, dan yang kelima review neraca. Arsita menjelaskan lima point tadi bertujuan untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun serta terpenuhinya akurasi, kendala dan keabsahan informasi. ■

(eko), foto: mimi/hr

LPP Harus Diperkuat dan Fleksibel

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang dihuni TVRI dan RRI harus diperkuat dan fleksibel keberadaannya di tengah gempuran siaran tv dan radio swasta. LPP diharapkan menjadi perekat dan penjaga kedaulatan budaya bangsa Indonesia. Fleksibilitas LPP juga diharapkan tidak terbentur oleh tradisi birokrasi seperti di lembaga negara lainnya.



Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo dalam diskusi Forum Legislasi DPR bertajuk RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI)

Demikian diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) di Media Center DPR, Selasa (31/5). Banyak siaran dari TVRI dan RRI yang tak ter-cover oleh siaran swasta, terutama menyangkut program budaya. Siaran swasta justru memasukkan budaya asing ke ruang privat keluarga Indonesia.

Hadir pula sebagai pembicara Kabul Budiono (RRI) dan Noerjaman (SCTV).

Disampaikan Arief, saat ini RUU RTRI masih pada tahap awal pembahasan yang isinya ingin memperkuat LPP agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Diupayakan RUU ini selesai sebelum masa keanggotaan dewan berakhir pada 2019. Dan RUU ini sebenarnya sudah pernah dibahas pada periode sebelumnya. Layanan LPP, lanjut politisi Hanura ini, tak boleh dihambat oleh sistem birokrasi. Karena ini adalah penyiaran publik, jadi harus fleksibel demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Banyak pasal yang harus cermat dibahas dalam RUU ini karena menyangkut interaksi dengan masyarakat luas dari beragam etnik dan kultur. "Kelak, TVRI dan RRI bisa menjadi penyeimbang dari siaran swasta nasional," ucap Arief.

Kabul Budiono mengusulkan agar TVRI dan RRI dimerjer menjadi satu lembaga dengan satu dewan pengawas. Namun, masih ada kendala psikologis menuju penyatuan TVRI dan RRI. Misalnya, soal aset dan kepegawaian yang belum selesai hingga kini. "Harus ada tenggat waktu peralihan menuju merjer," katanya.

Kabul menyambut baik inisiasi DPR membahas RUU RTRI. RUU ini, lanjutnya, harus didukung UU lainnya agar tak terjadi benturan. Misalnya, masalah keuangan LPP masih terbentur dengan UU Keuangan Negara. Selama ini belum jelas betul apakah pemasukan yang diterima TVRI dan RRI masuk ke dalam PNBPN atau tidak.

Sementara Noerjaman mengemukakan, TVRI dan RRI tak bisa menyaingi siaran swasta, karena belum mampu bertransformasi. Kehadiran UU RTRI kelak menjadi kebutuhan zaman bagi dua penyiaran pemerintah tersebut. TVRI sempat kehilangan kepercayaan publik, karena selalu menjadi corong pemerintah. Ketika kepercayaan menurun, masuklah siaran swasta yang mengalahkan siaran dari kedua penyiaran pemerintah tersebut. ■

(mb), foto: Antri/hr



BURT DPR Kunjungi RS Pertamina Sorong

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengunjungi Rumah Sakit (RS) Pertamina Sorong, Papua Barat. Fasilitas dan layanan di RS ini cukup baik, namun ada beberapa fasilitas di RS. Pertamina Sorong belum dilakukan perbaikan diantaranya ruang VVIP yang kurang nyaman untuk sekelas ruang VVIP.

dalam hal ini anggota DPR RI.

Pada kesempatan yang sama Kepala RS Pertamina Sorong Richard H Senduk.M.Kes memaparkan bahwa untuk ruangan VVIP akan segera kami renovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami terhadap anggota DPR, disini juga kami mengalami kendala kekurangan tenaga medis, ungkapnya.

Tim kunjungan kerja BURT ini dipimpin Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso (F-PD), didampingi Indah Kurnia (F-PDI Perjuangan), Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN), Refrizal (F-PKS) dan Ansory Siregar (F-PKS). ■

(Anaf) Foto: Andri/od

Menurut Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso (F-PD), kunjungan ini juga untuk melihat pelaksanaan Perpres No. 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaannya yakni Permenkes No. 55 Tahun 2014 dan Permenkeu No. 167 Tahun 2014 terkait pelayanan kesehatan pejabat negara termasuk anggota DPR dan keluarganya.

“Sebagai anggota BURT DPR RI kami memiliki tugas untuk memastikan pelayanan dan fasilitas beberapa rumah sakit yang menangani pasien BPJS dan Jamkestama seperti kami (anggota DPR RI). Setelah kami lihat langsung, fasilitas dan peralatan yang disiapkan rumah sakit Pertamina Sorong, Papua Barat, ini cukup memadai, seperti adanya pelayanan tramua center, Elektrokardiogram (EKG) yang merupakan alat untuk mengetahui kondisi jantung seseorang,” jelas Agung saat meninjau RS tersebut, Rabu (25/5) di Sorong, Papua.

Lebih lanjut Agung menjelaskan pihaknya ingin mengetahui lebih banyak layanan RS yang bekerja sama dengan Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Semua pejabat negara termasuk anggota DPR RI

sudah otomatis menjadi peserta Jasindo untuk mendapat layanan kesehatan VVIP lewat program Jamkestama (jaminan kesehatan utama).

Ada beberapa RS di setiap daerah yang ditunjuk Jasindo untuk melayani kesehatan para penyelenggara negara. Jaminan kesehatan ini juga diberikan kepada anggota keluarga pejabat negara,



Tim Kunjungan Kerja BURT DPR meninjau RS Pertamina Sorong di Papua Barat.



BERITA BERGAMBAR



Ketua DPR RI Ade Komarudin melihat Rak Display Majalah dan Buletin Parlemen yang diberikan secara gratis kepada masyarakat, di Bandara Soekarno Hatta, sebelum keberangkatannya menghadiri acara Gatbering Wartawan Koordinatoriat DPR/MPR/DPD RI di Batam (27/5), Foto : Istimewa



Wakil Ketua DPR Fabri Hamzah menjadi keynote speaker dalam International Conference and Congress on Political Science Development (ICCOPSD) bertema Democracy for People di Hotel Pandanaran, Semarang, Kamis, (2/6). Foto: Hendra/hr



Tim Kunjungan Kerja BURT DPR dipimpin Wakil Ketua Elva Hartati meninjau program jaminan kesehatan bagi Anggota DPR beserta keluarganya di RSUD Haulussy, Provinsi Maluku, Selasa (31/5). Foto: Ayu/hr

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 0811 9443 344



@dpr_ri



DPR RI



@DPR_RI



DPR RI